

**PERAN DANA DESA DI DESA KARANGAN UNTUK  
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**APRILIA NURAINI**

**NIM 210717231**

**Pembimbing**

**MUHTADIN AMRI, M.S.Ak.**

**NIP 198907102018011001**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN PONOROGO  
2021**

**PERAN DANA DESA DI DESA KARANGAN UNTUK  
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

**APRILIA NURAINI**

**NIM 210717231**

Pembimbing

**MUHTADIN AMRI, M.S.Ak.**

**NIP 198907102018011001**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN PONOROGO  
2021**

## ABSTRAK

**Nuraini, Aprilia.** 2021. Peran Dana Desa Di Desa Karanganyan Untuk Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Muhtadin Amri, M.S.Ak.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pembangunan Ekonomi Desa, Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program yang ada di Desa Karanganyan, seberapa akurat arah dari pembangunan masyarakat desa Karanganyan, seberapa banyak program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, seberapa besar animo masyarakat dalam menjalankan sebuah program dari pemerintah desa, seberapa peduli masyarakat dengan program Dana Desa hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi pelaksanaan program dana desa, faktor yang mendukung berlangsungnya program Dana Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti program pembangunan desa Karanganyan 70% bisa dikatakan menyentuh pembangunan di bidang infrastruktur hal ini terjadi sejak awal 2011 awal mula masuknya dana desa di desa Karanganyan, setelah itu program kerja pembangunan desa beralih kepada pemberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Karanganyan yang dimulai sejak tahun 2018 Alokasi dan arah dana desa setelah cair pada 2015 diperuntukkan untuk mempercepat pembangunan yang disesuaikan dengan pedoman dari pemerintah guna membangun infrastruktur yang baik dan mulailah pada saat itu dana desa di lakukan untuk pembangunan desa. masuknya dana desa ke desa Karanganyan pemerintah saat ini sudah dan sedang membina 9 program pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM yang semua bertujuan untuk membangun kemajuan desa Karanganyan, sembilan program tersebut diantaranya yaitu pembuatan jalan aspal atau paving, drainase talud, renovasi jalan aspal, BUMDes, posyandu, posbindu, paralegala dan BPNT, meski sebenarnya yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah desa sekarang adalah pembuatan BUMDes baru yang terhalang oleh covid-19. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa adalah penyesuaian terhadap pergantian kepemimpinan / kades, akan tetapi hal ini tidak berdampak pada pembangunan. Faktor-faktor penunjang dalam telaksananya pembangunan di desa Karanganyan adalah masyarakat desa yang mau untuk diberdayakan sebagai pelaksana dalam program padat karya tunai, serta suntikan dana dari pemerintah yaitu dana desa membuat percepatan pembangunan lebih mudah dilaksanakan dengan maksimal.



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Aprilia Nuraini	210717231	Ekonomi Syariah	ANALISIS PERAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI PRIORITAS DANA DESA (Studi Kasus di Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

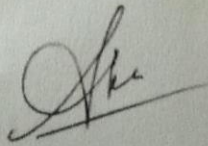
Ponorogo, 30 Oktober 2021.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Dri Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

  
MUHTADIN AMRI, M.S.Ak.  
NIP 198907102018011001

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


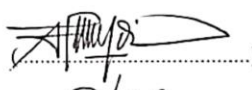

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Peran Dana Desa Di Desa Karangn untuk Pembangunan Ekonomi  
Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Nama : Aprilia Nuraini  
NIM : 210717231  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang  
Aji Damanuri, M.E.I  
NIP 197506022002121003  
Penguji I  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I  
NIP.197502072009011007  
Penguji II  
Muhtadin Amri, M.S.Ak.  
NIP 198907102018011001

:   
:   
: 

Ponorogo, 16 November 2021

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP.197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Nuraini  
NIM : 210717231  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Peran Dana Desa Di Desa Karangn untuk Pembangunan  
Ekonomi Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2021

Penulis



Aprilia Nuraini  
NIM.210717231

## PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Nuraini  
NIM : 210717231  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**Peran Dana Desa Di Desa Karangun Untuk Pembangunan Ekonomi Desa  
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan,



**Aprilia Nuraini**  
NIM, 210717231

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Lokasi atau Tempat Penelitian.....	13
3. Data dan Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengolahan data.....	18
6. Teknik Analisis Data .....	22
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>25</b>
A. Dana Desa.....	25
B. Pembangunan Ekonomi Desa.....	31
C. Faktor Penghambat dan Pendorong Penggunaan Dana Desa .....	37



D. Ekonomi Desa Menurut Ekonomi Islam .....	39
<b>BAB III PAPARAN DATA .....</b>	<b>42</b>
A. GAMBARAN UMUM DESA KARANGAN.....	42
B. Data.....	43
1. Penggunaan Dana Desa di Desa Karang.....	43
2. Dampak Adanya Dana Desa Untuk Pembangunan Desa .....	47
3. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Ekonomi Desa .....	48
<b>BAB IV ANALISIS PERAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI PRIORITAS DANA DESA.....</b>	<b>50</b>
A. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	50
1. Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Untuk Pembangunan Ekonomi.....	50
2. Dampak Terealisasinya Dana Desa di Desa Karang Terhadap Pembangunan Ekonomi .....	53
3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Karang.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. KESIMPULAN .....	58
B. SARAN.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan sering terjadi di Negara berkembang sebagaimana kita bangsa Indonesia salah satunya. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi program prioritas dalam pemerintahan. Menurut world bank kemiskinan adalah hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar per hari. Kemiskinan sering terjadi di pedesaan (12.869) daripada perkotaan (6,697)<sup>1</sup>, rendahnya pendidikan menyebabkan penurunan dalam segi sumberdaya manusia, serta kurangnya akses terhadap ruang publik menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mendompleng dan menggerakkan ataupun membangun ekonomi pedesaan agar terentaskan dari kemiskinan. Antara lain melalui pemberian bantuan Raskin (beras miskin), PNPM, Dana BOS dan BLSM akan tetapi beberapa upaya ini dinilai kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan maka Presiden Joko Widodo memasukkan program membangun desa dari pinggiran ke dalam salah satu program Nawacita dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Hal ini didukung Undang-undang Nomor 6& Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dana Desa dianggarkan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019*, 2019.

setiap tahun melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis (Permendes, 2018). Demi mewujudkan cita-cita bangsa maka di bangunlah ekonomi yang bersifat Inklusif dan berbasis kerakyatan. Dana desa merupakan program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang dijalankan mulai dari awal beliau menjabat atau dilantik hingga saat ini. Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari dibidang ekonomi dengan memberdayagunakan sumber daya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>2</sup>

Namun pelaksanaan dana desa di desa-desa banyak terjadi kendala seperti anggaran yang diperoleh. Kurangnya Keakuratan dan prioritas yang diambil oleh otonomi pemerintah setempat. Munculnya istilah “Desa Siluman” yang seolah-olah dimunculkan demi mencairkan dana yang luar biasa banyak dari pemerintah. Keuangan desa yang kurang transparan membuat peneliti memiliki ide untuk meneliti tentang bagaimana ekonomi dibangun melalui level paling dasar yaitu di Pedesaan, dengan adanya suntikan dana desa yang luar biasa dari pemerintah maka seharusnya desa-

---

<sup>2</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, 2019, 8.

desa di seluruh penjuru Indonesia mengalami kemajuan ekonomi, sarana prasarana dan faktor yang mempengaruhi usaha lainnya. Pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 Triliun untuk 74.958, rata-rata per-deso mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta setiap tahunnya di seluruh desa-desa di Indonesia.<sup>3</sup>

Prioritas dana desa lebih mengarah kepada bagaimana cara pemerintah desa menempatkan masyarakat desa pada predikat subjek, yang mana salah satu desa yang mendapatkan anggaran Dana Desa adalah desa Karangn Kecamatan Balong yang berada di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya banyak usaha di sekitar desa maka pemerintah desa mengambil keputusan untuk menciptakan sebuah perkumpulan dan bantuan terhadap usaha-usaha rumah tangga melalui BUMdes dan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kemampuan yang dimiliki oleh warga desa tersebut. Serta demi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang akurat maka dana desa di fokuskan untuk mengembangkan produk unggulan di desa tersebut. Nantinya masyarakat lah yang akan berperan aktif dalam terciptanya pengembangan ekonomi desa mereka. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan agar para pemuda usia kerja hingga penduduk yang sudah berkeluarga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pandangan ekonomi islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inofatif. Pembangunan

---

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tentang Dana Desa 2017* (Jakarta: Direktorat Jendral Primbangan Keuangan, 2017), 10.

memiliki perspektif yang luas, dimensi sosial-spiritual yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan saat ini. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat.

Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonomi dalam peradaban Islam seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan kebijakan terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu berupaya menata kembali pembagian kekayaan dan pemasukan negara dengan cara yang adil yang mendatangkan ridha Allah, mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menghilangkan kezhaliman. Umar bin Abdul Aziz juga sangat memperhatikan pertanian, di mana lahan pertanian termasuk lahan terbesar dalam skala pribadi dan ia memberikan pemasukan yang besar ke dalam kantong negara. Bahkan ekonomi pembangunanpun telah lahir jauh sebelum itu, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan, maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi merupakan cara desa untuk menyejahterakan masyarakat di Desa Karang Kecamatan Balong yang berada di kabupaten Ponorogo. Seperti dalam penelitian Atmojo,

Firidayanti, Pratama pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil dana desa digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat yang berada di desa bangunjiwo. Potensi yang dikembangkan antara nya adalah sentra kerajinan grabah di kasongan serta kerajinan lain di bangunjiwo seperti kerajinan jipangan, patung batu di lemahdadi, serta mengembangkan produk pariwisata bernama “KAJIGELEM” dengan adanya pengembangan potensi tersebut berarti pengangguran semakin berkurang dan muncul pelaku-pelaku dari masyarakat desa.<sup>4</sup> Penelitian selanjutnya yaitu dari Faizatul, Choirul, Ike tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada desa deket kulon kecamatan deket kabupaten lamongan), menunjukkan hasil dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di desa deket kulon desa deket kabupaten lamongan. Selain pemberdayaan masyarakat dana desa di pergunakan untuk memperbaiki jalan di desa deket.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan peneliti yaitu berbeda dalam lokasi penelitian, rumusan masalah, teori yang digunakan berbeda, alasan memilih lokasi penelitian di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, karena di tempat ini terdapat

---

<sup>4</sup> Atmojo, Fridayanti, and Pratama, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Dana Desa*, 5.1 (2017), 1–10 "https://doi.org/10.26740/jossae.v5n2.p124-138".

<sup>5</sup> Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2014), 597–602.

masalah yang saya teliti yaitu berupa kurangnya transparansi dana desa dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui program program yang ada di Desa Karang, seberapa akurat arah dari pembangunan masyarakat desa Karang, seberapa banyak program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, seberapa besar animo masyarakat dalam menjalankan sebuah program dari pemerintah desa, seberapa peduli masyarakat dengan program Dana Desa hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi pelaksanaan program dana desa, faktor yang mendukung berlangsungnya program Dana Desa. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperhatikan secara langsung yang terjadi dengan Peran Dana Desa Di Desa Karang Untuk Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Berdasarkan dari paparan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Dana Desa Di Desa Karang Untuk Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di desa Karang terhadap pembangunan ekonomi desa menurut perspektif ekonomi islam?
2. Bagaimana dampak dari adanya dana desa di desa Karang terhadap pembangunan ekonomi desa menurut perspektif ekonomi islam?

3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung adanya dana desa di desa Karangun untuk pembangunan ekonomi desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan dana desa di desa Karangun terhadap pembangunan ekonomi desa menurut perspektif ekonomi islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya dana desa di desa Karangun terhadap pembangunan ekonomi desa menurut perspektif ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung adanya dana desa di desa Karangun untuk pembangunan ekonomi desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, akan ditemukan peranan dana desa dalam pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Praktis

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dikaji dan dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka hasil penelitian dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah, dapat menjadi informasi tambahan dan sampel sebagai desa yang berhasil menjalankan program dana desa.



- b. Penulis, dapat menjadi tambahan wawasan serta pengetahuan jika nanti akan terjun di dalam masyarakat desa.
- c. IAIN Ponorogo, dapat dijadikan referensi bila mana ingin mencari referensi dalam mengerjakan penelitian di perpustakaan IAIN Ponorogo.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul yang dibuat peneliti terdapat penelitian terdahulu yang relevan guna sebagai pembanding penelitian ini:

Pengelolaan keuangan desa (Meutia, Liliana 2017), Berdasarkan penelitian ini prioritas dana desa di kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, berfokus pada pembangunan sarana prasarana, pembangunan kemandirian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan serta adanya perbedaan masyarakat guna menciptakan kemandirian ekonomi. dalam kajian hanya ada 5 dari 225 desa yang mengalokasikan dananya kepada BUMDes atau kelompok usaha masyarakat. dari seluruh kegiatan yang dilakukan di Sumatera Selatan semua tak lepas dari peraturan pemerintah yang ada yaitu undang-undang Pamendaagri. Persamaan penelitian ini adalah memfokuskan tentang pembagian dana desa digunakan di suatu negara. serta penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah waktu, tempat, dan objek itu sendiri. penelitian ini dilakukan di seluruh desa di kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Liliana Meutia, 'Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8.2 (2017), 1-17.

Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa (Dina, banurea, mahmudin, 2018). Dari penelitian ini dana desa lebih diprioritaskan atau dimanfaatkan sebagai pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dalam pembangunan sarana prasarana transportasi pertanian alasan pembangunan tersebut dilakukan dikarenakan sebagian besar masyarakat mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan dan dimanfaatkan pada pembangunan desa serta pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber dari primer maupun sekunder. Adapun perbedaan adalah pada waktu tempat dan objek penelitian itu sendiri.<sup>7</sup>

Efektifitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangujiwo (Atmojo, Fridayani, Pratama, 2017) Dari hasil penelitian ini dana desa digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat yang berada di desa bangujiwo. Potensi yang dikembangkan antara nya adalah sentra kerajinan grabah di kasongan serta kerajinan lain di bangujiwo seperti kerajinan jipangan, patung batu di lemahdadi, serta mengembangkan produk pariwisata bernama “ KAJIGELEM “ dengan adanya pengembangan potensi tersebut berarti pengangguran semakin berkurang dan muncul pelaku pelaku dari masyarakat desa. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yang

---

<sup>7</sup> Mahmuddin and Dina Banurea, 'Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3 (2018), 14 <[www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP)>.

khusus dengan penelitian yang peneliti kerjakan yaitu pada pengembangan produk lokal, dapat dikatakan jika penelitian ini menunjukkan jika desa Bangujiwo juga mengembangkan potensinya dengan mengalokasikan pada pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan produk lokal mereka. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, waktu, tempat dan objek itu sendiri.<sup>8</sup>

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada desa deket kulon kecamatan deket kabupaten lamongan), (faizatul, choirul, ike, 2016). Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di desa deket kulon desa deket kabupaten lamongan. Selain pemberdayaan masyarakat dana desa di pergunakan untuk memperbaiki jalan di desa deket. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan metode dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif, sedang begitu juga dengan alokasi dana desa yang digunakan untuk perbaikan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada tempat dan waktu penelitiannya.<sup>9</sup>

Otonomi daerah dan pembangunan pedesaan Nyimas Lathifah,(2016). Penelitian ini mengemukakan bagaimana kewenangan daerah mengalokasikan dana desa sebagai instrumen untuk pembangunan di desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama

---

<sup>8</sup> Atmojo, Fridayanti, and Pratama, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Dana Desa*, 5.1 (2017), 1–10 <<https://doi.org/10.26740/jossae.v5n2.p124-138>>.

<sup>9</sup> Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2014), 597–602.

diberikan kewenangan pemerintahan desa untuk memilih dan memilah program desa yang ini diaplikasikan menggunakan dana desa . Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari tempat dan waktu penelitian yang dilakukan.

Pengelolaan dana desa di kecamatan balong kabupaten Ponorogo (maretha, ridwan, 2019). Dalam penelitian ini mengemukakan bagaimanadana desa dialokasikan kepada pembangunan destinasi wisata asli dari desa tatung ini bertujuan guna mengentaskan kemiskinan yang ada di desa tatung kecamatan balong kabupaten ponorogo. Persamaan dengan penelitian yang terdahulu adalah pada pendekatan kuantitatif serta tujuan dari alokasikan dana desa tersebut. Perbedaan berada pada tempat dan waktu penelitiannya .<sup>10</sup>

Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (muhamad, ari, agus, 2016). Penelitian ini memaparkan permasalahan yang dihadapi pemerintahan desa krismoyoso dan girioto kecamatan nglapak kabupaten boyolali, terhadap kendala diantaranya kurang kephahaman kepala desa terhadap ketentuan dari permendes 2015. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yaitu kuantitatif serta pengambilan data yang menggunakan wawancara serta observasi. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada waktu dan tempat penelitian serta pada latar belakang masalah yang diteliti .<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maretha Berlianantiya Muhammad Ridwan Eka Wardani, 'Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 7.1 (2019), 63 <<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v7i1.3838>>.

<sup>11</sup> Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo, 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19.2 (2016), 323–40.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk menganalisis pembangunan ekonomi desa melalui prioritas pembangunan dana desa. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau masyarakat, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen dan bukan angka-angka. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini berisi tentang gambaran fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya.<sup>13</sup> Dengan demikian besar harapan penelitian ini akan berjalan dengan seksama dengan pendekatan yang lebih menyentuh ke masyarakat guna mencari data seakurat mungkin dari sumbernya langsung.

---

<sup>12</sup> Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),22.

<sup>13</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

## 2. Lokasi atau Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berawal dari keresahan penulis dengan alasan.

- a. Desa ini mendapat suntikan dana dari pemerintah melalui program Dana Desa yang cukup banyak dalam beberapa periode.
- b. Belum ada yang meneliti Dana Desa karena termasuk masih baru di kalangan masyarakat.
- c. Penelitian ini relevan dengan tema yang sedang diteliti.

Adapun estimasi waktu pada penelitian ini akan dilaksanakan pada 05 April sampai 05 Juli 2021. Dengan subjek penelitiannya adalah BPD, Pemerintahan Desa Karang, BUMDes dan Masyarakat Desa Karang.

## 3. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengidentifikasi menjadi 3 tingkatan huruf p dari bahasa inggris yaitu:

P= *person*, sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis.

P= *place*, sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan bergerak dan diam.

P= *paper*, sumber data berupa simbol yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, gambar, angka atau simbol-simbol lain.<sup>14</sup>

Sumber data primer diperoleh langsung dari Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, majalah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>15</sup> Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data

---

<sup>14</sup> Suharisimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: PT Rineka, 2010), h 172.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rakana Cipta, 1986), h 12.

yang ditentukan. Macam-macam teknik pengumpulan data secara umum dibagi menjadi empat yaitu:<sup>16</sup>

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Menurut Nawawi dan Martin, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.<sup>17</sup>

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa.<sup>18</sup> Setelah mengetahui hal tersebut maka peneliti akan langsung mendatangi lokasi di Desa Karang untuk melakukan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Cetakan Xx (Bandung: Alfabeta, 2016), h 224-225.

<sup>17</sup> Afifuddin and Beni ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h 134.

<sup>18</sup> Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 87.



tinjauan lapangan dan melihat program-program yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah Desa Karang.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mengambil beberapa responden diantaranya:

- 1) Observasi di Desa Karang khususnya di Dusun Bulak, Glagah, Karang dan Bangil guna mengetahui pembangunan jalan raya, sistem irigasi, dan jalan yang diperbarui.
- 2) Observasi dibalai desa guna mengetahui struktur lembaga literatur jurnal serta banner transparasi keuangan Desa Karang.
- 3) Observasi di kantor produksi BUMDes guna mengetahui seluk beluk usaha yang dimiliki oleh Desa Karang khususnya produksi batako dan paving.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggali ide-ide serta pemaparan masyarakat desa dan lembaga pemerintahan desa yang terlibat. Adapun responden yang terlibat diantaranya:

- 1) Wawancara dengan BPD untuk mendapatkan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dan pengawasan dalam menjalankan program dana desa.
- 2) Wawancara dengan lembaga pemerintahan desa yang diantaranya ada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pelayanan, Pemerintahan dan Kesejahteraan guna mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa itu berlangsung.
- 3) Wawancara dengan BUMDes (Ketua dan Pengelola BUMDes) guna mengetahui seluk beluk usaha yang dimiliki oleh Desa Karang.
- 4) Wawancara dengan masyarakat di setiap Dusun di Desa Karang (Bulak, Karang, Glagah, Bangil) guna mencari fakta apakah mereka juga mengetahui tentang program desa.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Karang dengan alat yang digunakan dokumentasi, arsip dan literatur. Pengumpulan data nantinya akan dilakukan dengan cara peninjauan langsung di tempat atau sektor-sektor pembangunan yang sedang dikerjakan atau dijalankan di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

**5. Teknik Pengolahan data**

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, kuisisioner, maupun dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

---

<sup>20</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar: Indobis Media Center, 2003). H 106

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama di lapangan maka datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu perlu segera dilakukan reduksi data. Menurut Miles, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.<sup>21</sup> Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap sudah ahli. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan diberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Bilamana ketika menemukan data baru atau temuan baru maka peneliti akan melakukan observasi dan wawancara lanjutan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa melalui prioritas pembangunan dan desa yang nantinya akan dibantu masyarakat dan pegawai pemerintahan desa Karanganyar.

b. Penyajian data

---

<sup>21</sup> <https://www.ruangguru.com/blog/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif>, diakses pada 10 April 2021 pukul 09:13 WIB.

Penyajian data adalah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan menyajikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam data yang runtut dan jelas. Dengan demikian akan memudahkan untuk dipahami tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa di Desa Karang Kecamatan Balong Kab. Ponorogo.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah di reduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian

---

<sup>22</sup> Muhammad Afif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2005). h 9.

membuat kesimpulan secara umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Susan Stainback adalah hal yang kritis dalam suatu penelitian, analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>23</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>24</sup>

Dengan demikian, analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil observasi dan interview secara mendalam. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah-milah data yang dianggap relevan dan penting, yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Peneliti menyajikan hasil penelitian, membuat kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai akhir dari penelitian ini.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2013), h 224.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), h 310..

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigmanya sendiri.<sup>25</sup> Adapun tekniknya dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti, yaitu menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

- a. Peneliti mengajukan berbagai macam variasi pernyataan
- b. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data
- c. Peneliti membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I yaitu pendahuluan, bagian ini berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang teori Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Bab ini merupakan rangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi: Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Faktor pendukung pembangunan ekonomi, Faktor penghambat pembangunan ekonomi, serta pengawasan dana desa pada masa pandemi covid-19.

BAB III membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan dalam bab ini meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian,

---

<sup>25</sup> Moelong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h 9.



Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik pengecekan Keabsahan Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV berisi Analisi tentang Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Faktor pendukung pembangunan ekonomi, Faktor penghambat pembangunan ekonomi, serta pengawasan dana desa pada masa pandemi covid-19.

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi hasil jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan dan saran.

## BAB II

### DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

#### A. Dana Desa

##### 1. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 Permendagri No.1 Tahun 2014 mengatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk-mendanai penyelenggaraan-pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Permendagri, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*, 2014 "https://doi.org/10.1145/2904081.2904088", 2.

<sup>2</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. 3

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 Pasal 10 no.1, Permendes, (2018) menyatakan bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.”<sup>3</sup>

Dengan adanya beberapa pernyataan dari ketiga pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa nyatanya dana desa harus diprioritaskan demi kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat desa. Pun Om pengelolaan sumber daya yang ada, pemerintah pusat berharap bahwa desa dapat mandiri dan bias menswa kelola potensi-potensi mereka. Wewenang ini diberikan bukan semata-mata hanya untuk memperkaya satu pihak, atau yang sering kita dengar dengan sebutan “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”. Pengelolaan dana desa harus transparan demi terwujudnya cita-cita bangsa yang bebas dari korupsi, konklusi dan nepotisme. Dengan demikian harapan saya sebagai penerus bangsa Indonesia kedepannya lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan.

---

<sup>3</sup> Permendagri, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*, 2014, 32

## 2. Alokasi Dana Desa

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2015 pasal 1 ayat 11 Alokasi Dana Desa Merupakan “Dana Yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.”

Menurut Kemenkeu (2017) “Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari danan perimbangan pusat dan daerah yang mana diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 1096 dari distribusi proposional untuk setiap desa”.<sup>4</sup>

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 menyebutkan bahwa “Alokasi dana desa adalah dana yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus”

Dari uraian diatas dapat diartikan alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

## 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

“Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Tentang Dana Desa 2017*, 2017.

<sup>5</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, 5.

Dengan adanya pemilihan dan pemrioritasan penggunaan Dana Desa maka harapannya pembangunan sektor ekonomi lebih di perhatikan, yang nantinya akan berdampak pada kemandirian masyarakat desa Penggalian produk-produk unggulan sangat perlu dilakukan karena dengan demikian sumberdaya-sumberdaya yang ada akan lebih bisa dimaksimalkan sedemikian rupa demi kepentingan masyarakat banyak.

Adapun contoh prioritas penggunaan dana desa di antaranya adalah:

a. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola 2 Karya Tunai

Permendes (2018) mengatakan bahwa, Penggunaan Dana desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi local dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.<sup>6</sup>

Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

1) Rehabilitasi irigasi

---

<sup>6</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, 61.

- 2) Pembersihan daerah aliran sungai
- 3) Pembangunan jalan rabat beton
- 4) Pembangunan rembung desa
- 5) Penanaman hutan desa
- 6) Penghijauan lereng pegunungan
- 7) Pembasmian hama tikus

Dengan demikian diharapkan bahwa program padat karya mampu memberi lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan keluarga miskin di Desa Karang Kec. Balong Ponorogo.

b. Pangan Aman di Desa

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di desa adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi desa.<sup>7</sup>

Dengan adanya pengamanan pangan bagi masyarakat desa diharapkan dapat menciptakan sebuah kesejahteraan bagi warga di desa, karena dengan adanya keamanan pangan maka nutrisi masyarakat desa tidak kalah dengan masyarakat dengan

---

<sup>7</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, h 64.

kemandirian dalam pengadaan pangannya. Dengan demikian pembangunan SDM unggul akan cepat terlaksana.

c. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

“Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana desa dapat memfasilkan pendapatan asli desa.”<sup>8</sup> Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat di prioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan desa (Prudes) dan/atau produk unggulan Kawasan pedesaan (prukades). Sedang begitu, di desa karangan ada beberapa produk-produk yang bisa dikembangkan dan menjadi produk unggulan desa. Seperti halnya, Tempe Keripik olahan rumahan, Peternakan Gemak, Budidaya Jamur, serta Kerajinan tangan “Rinjing”.

d. Pembentukan dan Pengembangan BUMDes Bersama

Permendes (2018) menyatakan bahwa, Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari dibidang ekonomi dengan memberdayakan sumber daya yang ada di desa. Keberdikarian desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

---

<sup>8</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, h 71.

kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>9</sup>

Dengan strategi yang demikian desa karangan sebenarnya sudah mengaplikasikannya akan tetapi pelaksanaannya masih kurang Maksimal. Dalam hal ini desa Karang sudah memiliki satu BUMDes yaitu Maju Makmur.

e. Pemberdayaan Hukum di Desa

Pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu men swakelola sumber daya secara mandiri, maka mereka perlu di berikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal.<sup>10</sup>

Dengan adanya pedoman yang demikian pemerintah diharap mampu memberikan pelatihan kepada perangkat desa Karang untuk kemudian melakukan sebuah studi pembelajaran agar mereka mengetahui tentang hukum yang kontraktual tersebut.

## **B. Pembangunan Ekonomi Desa**

### **1. Pengertian Pembangunan Ekonomi**

---

<sup>9</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, h 73.

<sup>10</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018*, 2018. h 15.



“Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.”<sup>11</sup>

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self system*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.<sup>12</sup>

“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>13</sup>

Dengan 3 pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan adalah sesuatu hal yang membutuhkan pengelolaan dan upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui infrastruktur, kebijakan pemerintahan desa serta penggunaan teknologi dan kajian yang tepat guna. Demi terwujudnya pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan berjangka panjang.

## **2. Peran Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

---

<sup>11</sup> Irawan Dan Suparmoko, *Ekonomi Pembanguna* (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 1997) h 221.

<sup>12</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>13</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, 2019. 4.

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 7090 penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.<sup>14</sup>

Dengan adanya rasio kependudukan yang berpusat pada desa maka jelas sekali harusnya pembangunan dimulai dari bawah atau bottom to up, yang dimana pembangunan akan dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kemandirian ekonomi dari masyarakat pedesaan.

### **3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan**

“Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: (1) transparansi (terbuka), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (S5) berkelanjutan (sustainable). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipasif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) H 15.

<sup>15</sup> Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipasif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h 96.

Dengan diketahuinya prinsip-prinsip pembangunan bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan itu seperti demokrasi, yang artinya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah desa perlu paham bahwa dengan mengetahui hal tersebut maka pembangunan harusnya berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati seluruh warga desanya serta yang paling penting dalam sektor pembangunan ekonomi desa.

#### **4. Strategi pembangunan pedesaan**

Terdapat 4 strategi pembangunan yang dapat diaplikasikan demi mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, diantaranya:<sup>16</sup>

##### **a. Strategi Pertumbuhan**

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam menilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sector pertanian permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan.

##### **b. Strategi Kesejahteraan**

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti

---

<sup>16</sup> Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h 75.

peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan prasarana dan sarana sosial lainnya.

c. Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan dari pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai kebutuhan pedesaan.

d. Strategi terpadu dan menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dengan memadupadankan keempat strategi yang telah dirumuskan oleh adimasta maka akan tercipta sebuah kesinambungan dan keakuratan dalam membuat strategi pelaksanaan pembangunan pedesaan. Karena jika tanpa aspek keempat yaitu terpadu dan menyeluruh maka akan tercipta sebuah gabs atau jarak dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial di lini masyarakat pedesaan.

## 5. Asas Pembangunan Pedesaan

Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu asas pembangunan integral, asas kekuatan sendiri, dan asas permufakatan.<sup>17</sup>

Pertama, asas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dilihat dari semua segi masyarakat desa yang meliputi sektor-sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya sehingga menjamin perkembangan yang selaras, seimbang dan tidak berat sebelah.

Kedua, asas kekuatan sendiri adalah setiap usaha harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, artinya tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.

Ketiga, asas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan pada bidang atau sektor yang benar-benar dirasa sebagai kebutuhan bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Pada waktu itu telah memasukkan ide kemandirian dalam pembangunan pedesaan.

Dengan demikian sudah menjadi cita-cita bangsa sejak era orde baru hingga sekarang bahwasannya desa perlu dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi lahan perekonomian yang mampu memberikan kenyamanan ekonomi bagi warganya.

---

<sup>17</sup> Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). h 112.

## 6. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

“Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll.) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat”.<sup>18</sup>

Dengan adanya pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi harusnya dimulai dari bawah keatas, dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat serta masyarakat pedesaan tidak manja dan bergantung pada nasib pemerintahan pusat.

### C. Faktor Penghambat dan Pendorong Penggunaan Dana Desa

#### 1. Faktor Penghambat Dana Desa Karangannya Untuk Pembangunan Ekonomi di Desa Karangannya

Ada dua macam hambatan pelaksanaan dan penggunaan dalam Dana Desa, mengacu pada (“Buku Pintar”, 2017) menunjukkan bahwa :

- a. Kendala Penggunaan
  - 1) Penggunaan di luar bidang Prioritas
  - 2) Pengeluaran tidak didukung bukti
  - 3) Pekerjaan oleh pihak ketiga
  - 4) Pajak tidak sesuai ketentuan

---

<sup>18</sup> Aprilia Theresia and Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, 2014.

- 5) Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan
  - 6) Belanja di luar anggaran
- b. Kendala Penyaluran
- 1) Perkada tata cara belum sesuai ketentuan
  - 2) Laporan realisasi belum disampaikan
  - 3) Pengajuaffgenyaluran tahap II belum ada
  - 4) APBDes belum terlambat ditetapkan
  - 5) Perubahan regulasi
  - 6) Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada
  - 7) Pergantian Kades

## 2. Faktor Pendorong Pembangunan Ekonomi Desa

“Pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri”.<sup>19</sup>

Buku Pintar (2018) menunjukkan dalam hasil penelitian dan penerapannya, Budaya gotong royong masyarakat desa lah yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa ini sendiri.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sangat membantu dalam terjadinya kesuksesan pembangunan di Desa karangan. Tanpa adanya Masyarakat sebagai faktor utama terjadinya pembangunan akan

---

<sup>19</sup> Wahjudin, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011) h 215.

sangat tidak mungkin pembangunan desa mampu terealisasi sepenuhnya.

#### **D. Ekonomi Desa Menurut Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inofatif. Pembangunan memiliki prespektif yang luas, dimensi sosial-spiritual yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan saat ini. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat.

Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonomi dalam peradaban Islam seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan kebijakan terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu berupaya menata kembali pembagian kekayaan dan pemasukan negara dengan cara yang adil yang mendatangkan ridha Allah, mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menghilangkan kezhaliman. Umar bin Abdul Aziz juga sangat memperhatikan pertanian, di mana lahan pertanian termasuk lahan terbesar dalam skala pribadi dan ia memberikan pemasukan yang besar ke dalam kantong negara. Bahkan ekonomi pembangunanpun telah lahir jauh sebelum



itu, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan, maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan.<sup>20</sup>

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Al-Quran memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki keadaan suatu kaumnya pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatukaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri". Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tuhan sang pencipta alam semesta tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sebelum bangsanya mengubah keadaannya sendiri. Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat agar mengubah keadaan bangsanya sehingga tercipta keadaan suatu bangsa yang *baldatun toyyibun wa robbun ghofur*.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah

---

<sup>20</sup> Adib Masruhan, *Penerapan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021. 41

di bumi dengan tugas memakmurkannya. bahwa Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjaditujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Almizan, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, IAIN Imam Bonjol, 2020. 220.

### **BAB III**

#### **PAPARAN DATA**

#### **A. GAMBARAN UMUM DESA KARANGAN**

##### **1. Sejarah Desa Karang**

Desa Karang mempunyai 4 Dusun. Desa Karang sendiri terletak 12 km dari pusat pemerintahan daerah Kab. Ponorogo secara geografis Desa Karang jauh dari perbukitan dan hutan dengan demikian bisa dikatakan Desa Karang jelas mudah untuk terdampak pembangunan. Untuk fasilitas umum sendiri Desa Karang sudah swasembada karena memiliki Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Polindes, Kantor PKK, BUMDes (Pabrik Skala Rumahan Bata Ringan), 1 Lapangan Sepat Bola, 3 Masjid serta 7 Mushola.

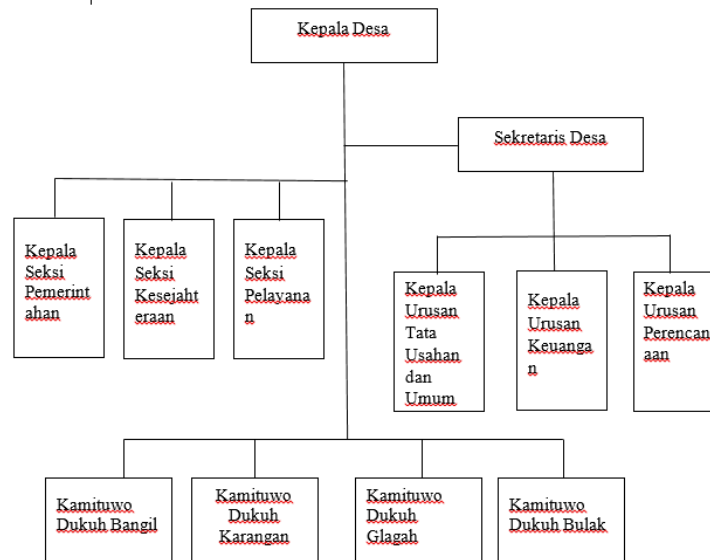
Fakta lain yang ditemukan 97% jalan di Desa Karang sudah teraspal dan sisanya masih berupa jalan dengan paving, hal ini menandakan bagaimana Dana Desa digunakan untuk Program Padat Karya guna memberdayakan Masyarakat atau pemuda desa yang menganggur. Fakta lain adalah ditemukan BUMDes dan PNPM Mandiri yang menandakan bahwa desa Karang percaya akan potensi desanya, produk asli desa Karang sendiri berupa Tempe Kripik dan Kerajinan Anyaman Rinjing.

## 2. Struktur Organisasi Desa Karang

### Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

#### Karangan Kecamatan Balong

**Gambar 4.1**



Struktur pemerintahan diatas menjelaskan bahwa Kantor Pemerintahan Desa Karang dipimpin oleh kepala desa yang kemudian diikuti oleh sekretaris desa dan dibantu kepla seksi dan kepala urusan serta mengkoordinir 4 kamituwo atau kepala dusun dibawahnya. Dari struktur atau bagan diatas semuanya berperan aktif dalam terciptanya roda pemerintahan di Desa Karang.

## B. Data

### 1. Penggunaan Dana Desa di Desa Karang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Karang diperoleh data wawancara dengan pertanyaan mengenai program apa

saja yang sedang dijalankan oleh pemerintah Desa Karang dalam upaya pembangunan ekonomi desa melalui dana desa?

Adi Sucipto (58) menjawab “sepengetahuan saya pembangunan melalui dana desa selama ini di alokasikan untuk menunjang prioritas infrastruktur dan juga untuk menjalankan program bumdes, guna menunjang pembangunan ekonomi di desa karangan.”<sup>1</sup>

Bambang Priyanoto (65) menjawab “saya selaku kepala Desa Karang pembangunan melalui dana desa selama ini di alokasikan dan di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur serta digunakan untuk menjalankan bumdes desa, hal ini diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi di desa karangan.”<sup>2</sup>

Parnomo (37) menjawab sejak 2015 pembangunan di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan juga program bumdes desa karangan guna menunjang pembangunan ekonomi yang inklusif.<sup>3</sup>

Panji (37) menjawab “sepengetahuan saya pemerintah mengerjakan system irigasi, bumdes berupa usaha keripik tempe, perbaikan jalan di Desa Karang.”<sup>4</sup>

Sairin (58) “selama ini sepengetahuan saya pemerintah mengerjakan system irigasi, bumdes berupa usaha keripik tempe, perbaikan jalan di Desa Karang.”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana desa yang diperoleh dari pemerintah digunakan untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur dan juga program bumdes (Badan usaha milik desa) berupa usaha keripik tempe, hal ini diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi di desa Karang.

---

<sup>1</sup> Adi Sucipto, *Wawancara*, 19 Mei 2021.

<sup>2</sup> Bambang Prayetno, *Wawancara*, 19 Mei 2021.

<sup>3</sup> Parnomo, *Wawancara*, 19 Mei 2021.

<sup>4</sup> Sairin, *Wawancara*, 19 Mei 2021.

<sup>5</sup> Sairin, *Wawancara*, 19 Mei 2021.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan standart hidup. Peningkatan standart hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa.<sup>6</sup> Untuk menghasilkan produksi barang dan jasa diperlukan adanya dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tentang pertanyaan mengenai arah pembangunan desa setelah mendapatkan suntikan dana dari program dana desa.

Rudi Santoso (35) menjawab pembangunan melalui dana desa selama ini untuk menjalankan program yang didanai oleh dana desa, yaitu pembuatan jalan aspal maupun paving (padat karya), drainase, Talut, renovasi jalan raya, BUMDes, Posyandu.<sup>8</sup>

Misni (36) menjawab “sejak 2018 baru tercipta BUMDes di desa karangan, yaitu MAJU MAKMUR yang memproduksi batarangan dan paving.”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dedy Aji Suseno, Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di kecamatan GunungPati Kota Semarang, Jurnal STIE Semarang, vol 8, no 2, 2016, 127.

<sup>7</sup> Permendes, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019. 3.

<sup>8</sup> Rudi Santoso, *Wawancara*, 19 Mei 2021

<sup>9</sup> Misni, *Wawancara*, 19 Mei 2021

Imam (30) menjawab “ada banyak saya kurang ngerti, setau saya ya pembangunan infrastruktur itu saja.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa setelah mendapat suntikan dana, digunakan untuk menjalankan program yang didanai oleh dana desa, yaitu pembuatan jalan aspal maupun paving (padat karya), drainase, Talut, renovasi jalan raya, BUMDes, Posyandu.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pemilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Adanya pemilihan dan pemrioritasan penggunaan dana desa maka harapannya pembangunan sector ekonomi lebih diperhatikan, yang nantinya akan berdampak pada kemandirian masyarakat desa. Adapun contoh prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah, pelaksanaan pembangunan desa dengan pola dua karya tunai, pangan aman di desa, pengembangan produk unggulan desa, pembentukan dan pengembangan bumdes, dan pemberdayaan hokum di desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa karangan, diketahui bahwa:

“Bambang Priyanto (65) menjawab, Sejak 2015 pembangunan di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa karangan guna penunjang pembangunan ekonomi yang inklusif”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Permendes, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, 2018. 15.

<sup>11</sup> Bambang Priyanto, *Wawancara*, 19 Mei 2021

“Adi Sucipto (58) menjawab, Kita biasanya menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat, dan untuk di desa karangan sendiri masih mengarah pada pembangunan insfratuktur”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program yang sudah dijalankan pemerintah desa Karangon salah satunya yaitu sudah dijalankannya pembangunan infrastruktur desa.

## **2. Dampak Adanya Dana Desa Untuk Pembangunan Desa**

Pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk dirinya sendiri.<sup>13</sup> Buku pintar (2018) menunjukkan dalam hasil penelitian dan penerapannya, budaya gorongroyong masyarakat desalah yang menjadi factor keberhasilan pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa ini sendiri.

“Hadi (33) menjawab, Masyarakat dalam hal ini terlibat pada program padat karya tunai serta menjadi pekerja tetap di bumdes yang dikelola oleh desa.”<sup>14</sup>

“Sukadi (45) menjawab, Masyarakat ikut serta dalam pembangunan infrastruktur pembangunan di desa seperti pembangunan jalan, pemasangan paving.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa Karangon, Balong.

---

<sup>12</sup> Adi Sucipto, *Wawancara*, 19 Mei 2021

<sup>13</sup> Wahjudin, *Perencanaan Desa Terpadu (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011)* 215.

<sup>14</sup> Hadi, *Wawancara*, 19 Mei 2021

<sup>15</sup> Sukadi, *Wawancara*, 19 Mei 2021



### 3. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Ekonomi Desa

Ada dua macam hambatan pelaksanaan dan penggunaan dalam dana desa, diantaranya yaitu: pertama kendala penggunaan, penggunaan diluar bidang prioritas, pengeluaran tidak didukung bukti, pekerjaan oleh pihak ketiga, pajak tidak sesuai ketentuan, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, belanja diluar anggaran. Kedua kendala penyaluran, laporan realisasi belum disampaikan, APBDes belum terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dokumentasi perencanaan dan laporan penggunaan belum ada, pergantian kades.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan yang dialami saat menjalankan pembangunan desa melalui prioritas penggunaan dana desa diketahui bahwa, menurut.

“Bambang Priyanto (65) Selama ini belum ada hambatan karena pemerintah yang mampu bekerjasama dan menciptakan energy yang baik antar masyarakat.”<sup>16</sup>

“Parnomo (37) Selama saya menjadi perangkat desa tidak ada hambatan mengenai prioritas penggunaan dana desa”.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui, hambatan dalam prioritas penggunaan dana desa tidak ditemukan dikarenakan semua pekerjaan sudah dilakukan secara maksimal, hambatan yang mungkin

---

<sup>16</sup> Bambang Priyanto, *Wawancara* 19 Mei 2021

<sup>17</sup> Purnomo, *Wawancara*, 19 Mei 202

terjadi adalah proses dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan secara tunai. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi.”

#### **4. Faktor Pendukung Pembangunan Ekonomi di Desa Karang**

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan yang maju, mandiri sejahtera, berkeadilan, berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buku Pintar (2018) menunjukkan dalam hasil penelitian dan penerapannya, budaya gotong royong masyarakat desa lah yang menjadi factor keberhasilan pelaksanaan pembangunan menggunakan dana desa.

Dari hasil wawancara mengenai faktor pendukung yang ada dalam pembangunan di desa Karang, diketahui bahwa menurut,

“Soirin (58) menjawab, Faktor pendukungnya yang jelas kami sebagai masyarakat dan dana desa yang terus mengalir dari desa, karena tanpa keduanya pembangunan tidak akan berjalan semestinya.”<sup>18</sup>

“Sugeng (42) menjawab, Faktornya ya kami sebagai masyarakat desa Karang.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat membantu dalam terjadinya kesuksesan pembangunan di desa Karang, tanpa adanya masyarakat sebagai factor utama terjadinya pembangunan akan sangat tidak mungkin pembangunan desa mampu terealisasi sepenuhnya.

---

<sup>18</sup> Soirin, *Wawancara*, 19 Mei 2021

<sup>19</sup> Sugeng, *Wawancara*, 19 Mei 2021

**BAB IV**

**ANALISIS PERAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA MELALUI**

**PRIORITAS DANA DESA**

**A. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Sejak tahun 2015 awal mulanya ada dana desa dari pemerintah, desa Karanganyan melakukan banyak percepatan pembangunan di bidang infrastruktur maupun di bidang perekonomian khususnya pemberdayaan. Perlu diketahui sesuai BPS setiap desa di seluruh Indonesia khususnya di desa Karanganyan rata-rata mendapatkan 800 juta pada setiap tahunnya.

**1. Penggunaan Dana Desa di Desa Karanganyan Untuk Pembangunan Ekonomi**

Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 10 no.1 permendes, (2018) menyatakan bahwa dana desa di gunakan untuk membiayai program dan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang di tujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayakan potensi dan sumber dayanya sendiri.<sup>1</sup>

Program desa yang sedang dijalani selama adanya dana desa sejak 2015 sendiri adalah pembangunan jalan raya antar dusun, pengaspalan

---

<sup>1</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018*. H 14-15

jalan makadam pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai yang di gunakan untuk pembangunan drainase dan talud, pelaksanaan posyandu balita dan paralegal, setelah 2018 sampai saat ini alokasi dana desa berubah arah pembangunan ekonomi masyarakat yang di tandai dengan pembangunan BUMDes. Dan sekarang pemerintahan sedang berusaha untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan BPNT

Prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran penting yang di fokuskan dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan”.<sup>2</sup>

Arah pembangunan atau penggunaan dana desa melalui dana desa di Desa Karang, diantaranya melalui lembaga yang diciptakan oleh desa Karang yaitu BUMDes MAJU MAKMUR yang memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan desa dengan mengelola dana desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Menurut hasil wawancara kepada beberapa perangkat desa, BUMDes MAJU MAKMUR Desa Karang dapat membantu meningkatkan dana desa yaitu dengan memproduksi bata ringan, batako, dan segala jenis paving. Selain itu, penggunaan dana desa ini

---

<sup>2</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. h 9..

juga digunakan untuk pembangunan akses jalan desa, perbaikan jalan desa dengan mengaspal maupun melakukan perbaikan jalan dengan paving, pembuatan drainase, dan pembuatan talut, hal tersebut jika terlaksana akan dapat memperbaiki warna jalan dan akses desa yang nyaman bagi masyarakat. Dana desa juga untuk memajukan posyandu di desa Karang, posyandu di desa Karang yang terdapat posyandu lansia yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada setiap dukuh dan posyandu balita yang dilakukan setiap 3 minggu sekali pada setiap dukuh. Pelatihan paralegal undang-undang yang dilaksanakan dengan dana dari Kabupaten bagi para petugas pemerintahan desa melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa sembako untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain untuk dibiayai dengan dana desa”.<sup>3</sup>

Dengan adanya pemilihan dan memprioritaskan penggunaan dana desa, diharapkan penggunaan sektor ekonomi lebih diperhatikan, yang nantinya akan berdampak pada kemandirian masyarakat desa. Terhitung sejak tahun 2015 dan dibarengi dengan masuknya dana desa ke Desa Karang pemerintahan saat ini sudah dan sedang membina sembilan program pembangunan ekonomi pembangunan infrastruktur

---

<sup>3</sup> Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. h 5.

serta pembangunan SDM yang semuanya bertujuan untuk kemajuan Desa Karang. Sembilan program kerja tersebut di antaranya yaitu pembuatan jalan aspal ataupun paving, pembuatan drainase, pembuatan talut, perbaikan jalan raya, mengelola dan mengembangkan BUMDes, memajukan posyandu, posbindu, pelatihan paralegal dan BPNT dari pemerintah. Namun dalam kenyataannya yang memberikan pekerjaan rumah sehari-hari bagi para petugas desa yaitu dengan mengelola dan mengembangkan BUMDes harus terhalang untuk sementara waktu dikarenakan pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan dihidupkannya BUMDes TANI bagi kelompok tani yang mulanya tidak aktif akan aktif kembali dan akan membantu menjadi tengkulak dari hasil tani para warga desa Karang serta menyediakan kebutuhan tani lainnya. Dengan demikian, perputaran roda ekonomi di Desa Karang secara perlahan akan bergerak stabil dengan kemungkinan mendekati ke arah maju.

## **2. Dampak Terealisasinya Dana Desa di Desa Karang Terhadap Pembangunan Ekonomi**

Desa Karang sendiri telah berupaya mewujudkan sekaligus memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat seperti, adanya fasilitas kesehatan dan fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pengelolaan BUMDes dengan menghasilkan produksi berupa bata ringan, batako, dan segala jenis

paving, pelayanan posyandu baik untuk balita maupun lansia, posbindu, serta adanya perbaikan jalan, pembuatan drainase, pembuatan talut yang akan menciptakan akses jalan desa yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Buku pintar (2018) menunjukkan dalam hasil penelitian dan menerapkan, budaya gotong royong masyarakat desa lah yang menjadikan keberhasilan pembangunan menggunakan dana desa ini sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek dalam terjadinya program-program pembangunan desa diantaranya sebagai program padat karya yang biasanya diberdayakan untuk pembangunan jalan di desa karangan, pembangunan drainase, pelaku- pelaku kesehatan posbindu dan posyandu, pelaksana dan pekerja dalam BUMDes. Masyarakat dilibatkan guna menunjang perekonomian mereka yang biasanya mengalami pengangguran musiman. Yang terjadi setelah tanam padi sampai sebelum panen. Hal ini diketahui dari mayoritas masyarakat desa karangan adalah petani mesti sebagian besarnya juga pedagang.

b. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dana desa

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa,

camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Masyarakat dalam hal ini mengawasi alokasi anggaran yang ada melalui transparansi pemerintah dalam memaparkan anggaran dana desa , APBDes kedalam sebuah baner besar yang berisikan pemasukan dan pengeluaran desa . dari sini selain menjadi pelaku pembangunan dan menjadi pengawas dari pemerintahan desa, bila mana ada penyalah gunaan dalam lapangan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Hal ini saat musrenbang, pada saat itu masyarat mendorong pemerintah agar mau membuka dana anggarannya kepada publik.

Dengan adanya bukti tersebut, Desa Karanganyan dapat dikatakan sebagai desa yang maju dan mandiri dengan prinsip kepemimpinan yang bijaksana, adil dan makmur, serta memeratakan keselarasan dengan syariat Islam.

### **3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Karanganyan**

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa yang sering ditemui yakni yang pertama kendala penggunaan, penggunaan diluar bidang prioritas, pengeluaran tidak didukung bukti, pekerjaan oleh pihak ketiga, pajak tidak sesuai ketentuan, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, belanja



diluar anggaran. Perkara tata cara belum sesuai ketentuan realisasi belum disampaikan penyuluhan tahap II belum ada, APBDes belum/terlambat di terapkan, perubahan regulasi, dokumen pencatatan dan pelaporan penggunaan belum ada dan pergantian kades. Hambatan selama pelaksanaan sebenarnya adalah pada setiap bagian pemodalan setiap program kerja yang ada akan tetapi dengan adanya dana desa tidak lagi begitu berarti hambatan yang sebelumnya pernah ada.

Menurut BPD sendiri dengan adanya pergantian kepala desa, perangkat dan keseluruhan organisasi desa membutuhkan penyesuaian. daripada hambatan di Desa Karang memiliki tantangan dalam menjalankan BUMDes agar terjadi kontinuitas dalam pelaksanaanya. Demikian di era pandemi seperti sekarang ini menyebabkan banyak masalah di bendahara desa, oleh karena itu di butuhkan sinergi yang baik dalam setiap anggota pemerintahan di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Buku pintar (2018) menunjukan dalam hasil penelitian dan penerapan, budaya gotong royong di masyarakat desa lah yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan penggunaan dana desa ini . Faktor-faktor pendukung disini dijelaskan bahwa ada banyak komponen di sebuah masyarakat maupun menyongkong sebuah kesempurnaan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan desa. Dengan adanya dana desa sendiri juga membuat financial dana desa bertambah, membuat pelaksanaan pembangunan lebih cepat

dikerjakan, tidak hanya itu dana desa juga dapat membantu memecahkan masalah pandemi sekarang ini, yakni memberikan bantuan secara langsung dan bertahap kepada warga desa dan sedikit membantu permasalahan finansial keluarga yang terdampak covid-19 pada saat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran dana desa di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terhadap pembangunan ekonomi desa menurut perspektif ekonomi islam diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pembangunan Desa Karang 70% bisa dikatakan menyentuh pembangunan di bidang infrastruktur hal ini terjadi sejak awal 2015 awal mula masuknya dana desa di Desa Karang, setelah itu program kerja pembangunan desa beralih kepada pemberdayaan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Karang yang dimulai sejak tahun 2018, diantaranya program pembangunan infrastruktur dan juga program BUMDes (Badan Usaha Miliki Desa) berupa usaha keripik tempe, dan produksi batu ringan, batako, dan segala jenis paving hal ini diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi di desa Karang.
2. Dampak adanya dana desa untuk pembangunan ekonomi di Desa Karang mampu menunjang kelancaran pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat seperti, adanya fasilitas kesehatan dan fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pengelolaan BUMDes dengan menghasilkan produksi berupa bata ringan, batako, dan segala jenis paving, pelayanan posyandu baik untuk balita maupun lansia, posbindu,

serta adanya perbaikan jalan, pembuatan drainase, pembuatan talut yang akan menciptakan akses jalan desa yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

3. Faktor Penghambatan yang dialami oleh pemerintah desa adalah penyesuaian terhadap pergantian kepemimpinan / kades, akan tetapi hal ini tidak berdampak pada pembangunan. Faktor pendukung dalam telaksananya pembangunan di Desa Karang adalah masyarakat desa yang mau untuk di berdaya gunakan sebagai pelaksana dalam program padat karya tunai, serta suntikan dana dari pemerintah yaitu dana desa membuat percepatan pembangunan lebih mudah dilaksanakan dengan maksimal.

## **B. SARAN**

1. Bagi desa karangan
  - a. Pemerintahan desa terus mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa maupun pembangunan perekonomian
  - b. Pemerintahan desa selalu menjadi garda terdepan inisiator pembangunan desa dan melaksanakan sebaik baiknya penggunaan dan pemilihan alokasi dana desa.
  - c. Masyarakat dapat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengembangan program pemerintah desa agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, R, 'Lembar Kegiatan Literasi Sainifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Corona Virus 2019 (Covid-19)', *Jurnal Edukatif*, 2.1 (2018), 28–37
- Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Afifuddin, and Beni ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar: Indobis Media Center, 2003)
- Arikunto, Suharisimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: PT Rineka, 2010)
- Arsyad, Azhar, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Atmojo, Fridayanti, and Pratama, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Dana Desa*, 5.1 (2017), 1–10  
<<https://doi.org/10.26740/jossae.v5n2.p124-138>>
- Indonesia, Kementrian Keuangan Republik, *Tentang Dana Desa 2017* (Jakarta: Direktorat Jendral Primbangan Keuangan, 2017)
- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, and Agus Widodo, 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19.2 (2016), 323–40
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2014), 597–602
- Lexy, Moelong J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Mahmuddin, and Dina Banurea, 'Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3 (2018), 14  
<[www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP)>
- Meutia, Inten, 'Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8.2 (2017), 1–17
- Muhammad Ridwan Eka Wardani, Maretha Berlianantiya, 'Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo', *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 7.1 (2019), 63  
<<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v7i1.3838>>
- Permendagri, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*, 2014  
<<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>>
- Permendes, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018*, 2018
- , *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, 2018
- Purhantara, Wahyu, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rakana Cipta, 1986)
- Soewadji, Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Statistik, Badan Pusat, *CONTEKAN* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- , *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019*, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Cetakan Xx (Bandung: Alfabeta, 2016)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suparmoko, Irawan dan, *Ekonomi Pembanguna* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1997)
- Theresia, Aprilia, and Dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, 2014
- Tito, Muhammad Afif, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Wahjudin, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Reinforcement Action and Development, 2011)